



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pegawai negeri sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, maka perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek nomor 4 tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor

16

berdasarkan dan Susunan

nomor 17 tahun 2013 tentang Tata Kelola

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

berdasarkan dan Susunan

TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS.
11. Target Kinerja adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas Jabatan.
12. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
13. Disiplin Kerja adalah ketaatan perilaku kerja PNS terhadap ketentuan jam kerja yang ditunjukkan berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran pada saat masuk kerja dan tidak masuk kerja.
14. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
15. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah hasil penilaian dan evaluasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah oleh Inspektorat.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan besaran TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. penerima TPP;
- d. pemberian dan penghitungan TPP;
- e. mekanisme penilaian produktivitas kerja melalui penilaian kinerja;
- f. tata cara pembayaran; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 4

Penetapan besaran TPP PNS didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Pasal 5

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan dengan memperhitungkan akumulasi nilai SAKIP dan nilai IKM.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan dengan memperhitungkan tingkat risiko pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan sepanjang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah serta karakteristik Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut tentang Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENERIMA TPP
Pasal 7

- (1) Penerima TPP dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kelompok A menerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
 - b. kelompok B menerima TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja.
 - c. kelompok C menerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja.
- (2) Penerima TPP kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Penerima TPP kelompok B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah seluruh PNS Kelas Jabatan 1 (satu), Kelas Jabatan 2 (dua), Kelas Jabatan 3 (tiga), dan Kelas Jabatan 5 (lima).
- (4) Penerima TPP kelompok C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah seluruh PNS selain Penerima TPP kelompok A dan penerima TPP kelompok B.

Pasal 8

- (1) Penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi:
 - a. pemungut pajak Daerah;
 - b. pemungut retribusi Daerah;
 - c. pemberi jasa pelayanan kesehatan;
 - d. penanggungjawab pengelolaan keuangan;
 - e. pengadaan barang atau jasa;
 - f. Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
 - g. pengelola barang milik Daerah; dan
 - h. profesi guru.

- (2) Pemberi jasa pelayanan kesehatan dan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf h hanya menerima TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain pemberi jasa pelayanan kesehatan dan profesi guru, dapat menerima TPP berdasarkan kelompok Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

BAB VII

PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada Kelas Jabatan dari masing-masing nama Jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perubahan nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah Jabatan pada peta Jabatan Perangkat Daerah, TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan yang setara.

Pasal 10

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan negeri;
- b. PNS yang sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian dan/atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

- c. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- d. PNS yang diperbantukan dan bekerja secara penuh di instansi lain;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- f. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa;
- g. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun; dan
- h. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah paling sedikit selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 11

- (1) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) setingkat lebih rendah dibawahnya, menerima TPP berdasarkan Jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada Jabatan dan Kelas Jabatan yang setingkat, menerima TPP dari Jabatan definitif, ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari TPP yang nilainya lebih rendah.
- (3) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada Jabatan satu tingkat di atasnya, menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) Dalam hal PNS merangkap sebagai penjabat kepala desa, maka yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan Jabatan definitifnya sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibayarkan sesuai dengan Jabatan dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (2) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) TPP bagi CPNS formasi Jabatan administrasi dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan diangkat menjadi PNS.
- (4) TPP bagi CPNS formasi Jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan diangkat dalam Jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Penilaian TPP

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan Disiplin Kerja dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (2) Formulasi pembayaran TPP dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP (yang diterimakan)} = \text{TPP} \times (\text{PK} + \text{DK})\%$$

keterangan :

TPP	=	Tambahan Penghasilan Pegawai
PK	=	Produktifitas Kerja
DK	=	Disipilin Kerja

Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PK} = \frac{(30 \times \text{Skor Capaian Kinerja})}{100}$$

- (2) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan penilaian Capaian Kinerja bulanan terhadap Target Kinerja bulanan.
- (3) Skor Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan capaian Indikator Kinerja dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. >80 sampai dengan 100 kategori **Baik** dan dihitung 100;
 - b. >60 sampai dengan 80 kategori **Cukup** dan dihitung 80;
 - c. >40 sampai dengan 60 kategori **Sedang** dan dihitung 60;
 - dan
 - d. >25 sampai dengan 40 kategori **Kurang** dan dihitung 30.

Pasal 15

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berdasarkan skor kehadiran pegawai.
- (2) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi absensi kehadiran setiap PNS setiap bulan yang dilakukan dengan rekam kehadiran berdasarkan *finger print* sebagaimana perhitungan dalam Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai.
- (3) Absensi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam dapat dilakukan secara manual.

Pasal 16

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$DK = \frac{(70 \times \text{skor kehadiran})}{100}$$
- (2) Faktor pengurang skor kehadiran dalam penilaian Disiplin Kerja meliputi:
 - a. Terlambat (TL);
 - b. Pulang Sebelum Waktunya (PSW);
 - c. cuti; dan
 - d. tidak masuk tanpa alasan yang sah (TM).
- (3) Penghitungan pengurangan skor karena TL (Terlambat) dan PSW (Pulang Sebelum Waktunya) dalam 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diakumulasikan menjadi 1 (satu).
- (4) Besaran prosentase pengurangan skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal TL /PSW /TM karena melaksanakan tugas di luar unit kerja/perangkat daerahnya tidak dikenakan pengurangan skor kehadiran dengan dibuktikan surat perintah/dispensasi dari pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal cuti sakit karena terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tidak dikenakan pengurangan skor kehadiran.
- (7) Dalam hal melaksanakan *Work From Home* (WFH) skor kehadiran dihitung penuh.
- (8) Dalam hal cuti melahirkan diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP per bulan sesuai dengan jabatannya.

- (9) Apabila PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin maka TPP diperhitungkan dari tingkat kehadiran.
- (10) Apabila PNS meninggal dunia, maka TPP tetap diberikan pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP per bulan sesuai dengan jabatannya.

BAB VIII

MEKANISME PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI PENILAIAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Penilaian produktivitas kerja dalam pemberian TPP dilaksanakan melalui mekanisme penilaian kinerja secara manual dan/atau sistem informasi *e-kinerja*.
- (2) Pelaksanaan input ke sistem informasi *e-kinerja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masa percobaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan penilaian produktivitas kerja dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja secara manual.
- (4) Format penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Mekanisme penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. sasaran/Target Kinerja tahunan ditetapkan setiap awal tahun pada minggu kedua bulan Januari meliputi:
 1. sasaran/Target Kinerja pejabat pimpinan tinggi, disusun berdasarkan perjanjian kinerja dengan memperhatikan rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja tahunan, dan tata kerja serta uraian tugas Jabatan;

2. sasaran/Target Kinerja pejabat administrasi disusun berdasarkan sasaran kerja atasan langsungnya dengan memperhatikan organisasi, tata kerja dan uraian Jabatan; dan
 3. sasaran/ Target Kinerja pejabat fungsional tertentu, disusun berdasarkan sasaran kerja atasan langsungnya dengan memperhatikan perjanjian kinerja, rencana kerja tahunan, organisasi, tata kerja, dan uraian Jabatan serta dengan memperhatikan butir-butir kegiatan untuk Jabatan fungsional.
- b. sasaran/Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem informasi *e-kinerja*;
 - c. sasaran/Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b harus selaras dengan sasaran/Target Kinerja atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come* organisasi;
 - d. sasaran/Target Kinerja bulanan ditetapkan setiap awal bulan berkenaan berdasarkan Target Kinerja tahunan;
 - e. Capaian Kinerja tahunan/ bulanan divalidasi oleh pejabat penilai; dan
 - f. pejabat penilai dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai dengan cara transfer ke rekening gaji PNS atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerimaan TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) TPP untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP dilengkapi dengan:

- a. keputusan Pengguna Anggaran tentang penerima TPP;
- b. daftar perhitungan kehadiran;
- c. daftar skor Capaian Kinerja;
- d. dokumen realisasi kinerja bulanan;
- e. daftar perhitungan penerimaan TPP;
- f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- g. ID Billing PPh Pasal 21.

Pasal 21

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP diajukan ke BUD dilampiri dengan:
 - a. keputusan Pengguna Anggaran tentang penerima TPP;
 - b. daftar perhitungan kehadiran;
 - c. daftar skor Capaian Kinerja;
 - d. dokumen realisasi kinerja bulanan;
 - e. daftar perhitungan penerimaan TPP;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - g. ID Billing PPh Pasal 21.
- (2) Format daftar perhitungan ketidakhadiran, daftar skor Capaian Kinerja dan daftar perhitungan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Daftar nama Jabatan, Kelas Jabatan dan besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2021

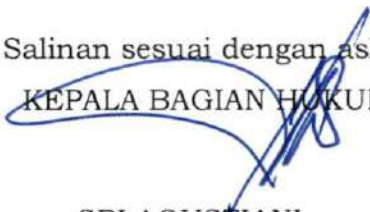
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

TTD.

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	15	27,172,000
		ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	13,500,000
		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14	13,500,000
		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	14	13,500,000
		STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	13	12,117,000
		STAF AHLI BUPATI BIDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	13	12,117,000
		STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	12,117,000
		AHLI UTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA	13	8,501,000
		KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	12	9,688,000
		KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	9,688,000
		KEPALA BAGIAN HUKUM	12	9,688,000
		KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	12	9,688,000
		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12	9,688,000
		KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	9,688,000
		KEPALA BAGIAN UMUM	12	9,688,000
		KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12	9,688,000
		KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12	9,688,000
		AHLI MADYA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11	5,557,000
		AHLI MADYA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA	11	5,557,000
		KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9	4,754,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4,754,000
		KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM	9	4,754,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,754,000
		KEPALA SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	9	4,754,000
		KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	9	4,754,000
		KEPALA SUB BAGIAN TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	9	4,754,000
		AHLI MUDA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	3,977,000
		AHLI MUDA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA	9	3,977,000

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN PEREKONOMIAN	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	8	4,188,000
KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	8	4,188,000
AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8	3,380,000
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	3,380,000
PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7	3,531,000
ANALIS PUBLIKASI	7	3,531,000
ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	7	3,531,000
ANALIS BATAS WILAYAH	7	3,531,000
ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	7	3,531,000
PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	7	3,531,000
ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	7	3,531,000
ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	3,531,000
ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3,531,000
ANALIS HUKUM	7	3,531,000
ANALIS SISTEM INFORMASI	7	3,531,000
ANALIS KEUANGAN	7	3,531,000
PENELAAH PERKEMBANGAN BUMD	7	3,531,000
PENELAAH DATA SUMBER DAYA ALAM	7	3,531,000
ANALIS PEMBANGUNAN	7	3,531,000

	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,531,000
	ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	3,531,000
	PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7	3,531,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,531,000
	BENDAHARA	7	3,531,000
	ANALIS KINERJA	7	3,531,000
	ANALIS KELEMBAGAAN	7	3,531,000
	ANALIS JABATAN	7	3,531,000
	ANALIS PELAYANAN PUBLIK	7	3,531,000
	ANALIS PROTOKOL	7	3,531,000
	ANALIS HUMAS	7	3,531,000
	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	7	3,531,000
	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	7	3,531,000
	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,531,000
	ANALIS TATA LAKSANA	7	3,531,000
	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARA	7	3,531,000
	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	3,068,000
	PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA	6	3,068,000
	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	3,068,000
	PENGELOLA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	6	3,068,000
	PENGELOLA KEMASYARAKATAN SPIRITUAL	6	3,068,000
	PENGELOLA DOKUMENTASI	6	3,068,000
	PENGELOLA DATA KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO	6	3,068,000
	PENGELOLA PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM	6	3,068,000
	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	6	3,068,000
	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	6	3,068,000
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA	6	3,068,000
	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	6	3,068,000
	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	3,068,000
	PENGELOLA DATA TATA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	6	3,068,000
	PENGELOLA SARANA DAN PRASARAN RUMAH TANGGA DINAS	6	3,068,000
	PENGELOLA BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6	3,068,000
	PENGELOLA DOKUMENTASI	6	3,068,000
	PENGELOLA DATA	6	3,068,000

		PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	6	3,068,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	3,068,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	3,068,000
		PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN	6	3,068,000
		PENGOLAH DATA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN	6	3,068,000
		PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	6	3,068,000
		PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN	6	3,068,000
		PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6	3,068,000
		PENGOLAH DATA	6	3,068,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	3,068,000
		PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	6	3,068,000
		PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	6	3,068,000
		PRANATA BARANG DAN JASA	6	3,068,000
		PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	6	3,068,000
		PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	3,068,000
		SEKRETARIS	6	3,068,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	3,068,000
		VERIFIKATOR KEUANGAN	6	3,068,000
		PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	6	3,068,000
		AJUDAN	6	3,068,000
		PRANATA TAMAN	6	3,068,000
		PRANATA JAMUAN	6	3,068,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3,068,000
		TEKNIK PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PETUGAS PROTOKOL	5	2,347,000
		TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	5	2,347,000
		TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	5	2,347,000
		PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	3	1,609,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
2	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	14	13,609,000

AHLI UTAMA - AUDITOR	13	8,403,000
AHLI UTAMA - AUDITOR KEPEGAWAIAN	13	8,403,000
AHLI UTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	13	8,403,000
SEKRETARIS	12	8,985,000
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	11	7,430,000
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	11	7,430,000
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	11	7,430,000
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	11	7,430,000
AHLI MADYA - AUDITOR KEPEGAWAIAN	11	5,437,000
AHLI MADYA - AUDITOR	11	5,437,000
AHLI MADYA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	11	5,437,000
AHLI MUDA - AUDITOR KEPEGAWAIAN	9	3,839,000
AHLI MUDA - AUDITOR	9	3,839,000
AHLI MUDA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	9	3,839,000
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	4,151,000
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	4,151,000
AHLI PERTAMA - AUDITOR KEPEGAWAIAN	8	3,306,000
AHLI PERTAMA - AUDITOR	8	3,306,000
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	8	3,306,000
PENYELIA - AUDITOR	8	3,306,000
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	3,498,000
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	3,498,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,498,000
BENDAHARA	7	3,498,000
PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - AUDITOR	7	2,915,000
PRANATA KEARSIPAN	6	3,040,000
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3,040,000
PENGOLAH DATA	6	3,040,000
PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	6	3,040,000
PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	3,040,000
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	3,040,000
PENGELOLA KEUANGAN	6	3,040,000

		PENGELOLA DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	6	3,040,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	3,040,000
		PELAKSANA/TERAMPIL - AUDITOR	6	2,533,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN AN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - PERENCANA	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - PENELITIAN	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - PRANATA KOMPUTER	13	8,306,000
		SEKRETARIS	12	8,985,000
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA	11	7,370,000
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	11	7,370,000
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	11	7,370,000
		KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN INOVASI DAERAH	11	7,370,000
		AHLI MADYA - PERENCANA	11	5,135,000
		AHLI MADYA - PENELITIAN	11	5,135,000
		AHLI MADYA - PRANATA KOMPUTER	11	5,135,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA AIR	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN PERUMAHAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4,662,000

AHLI MUDA - PERENCANA	9	3,702,000
AHLI MUDA - PENELITI	9	3,702,000
AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	9	3,702,000
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	8	4,115,000
AHLI PERTAMA - PERENCANA	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PENELITI	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	8	3,123,000
PENYELIA - PRANATA KOMPUTER	8	3,123,000
BENDAHARA	7	3,466,000
ANALIS KEUANGAN	7	3,466,000
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	3,466,000
ANALIS PERENCANAAN	7	3,466,000
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,466,000
ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN	7	3,466,000
ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	3,466,000
ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	3,466,000
ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	3,466,000
PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	3,466,000
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	7	3,466,000
ANALIS SOSIAL BUDAYA	7	3,466,000
ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	7	3,466,000
ANALIS PARIWISATA	7	3,466,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,466,000
ANALIS PEMBANGUNAN	7	3,466,000
ANALIS PELAKSANA PROYEK PEMERINTAH	7	3,466,000
ANALIS PRASARANA PERKOTAAN DAN PEDESAAN	7	3,466,000
ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	7	3,466,000
ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7	3,466,000

		ANALIS PENELITIAN	7	3,466,000
		ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	3,466,000
		ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	7	3,466,000
		ANALIS SISTEM INFORMASI	7	3,466,000
		ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	3,466,000
		ANALIS PENDIDIKAN	7	3,466,000
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - PRANATA KOMPUTER	7	2,753,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3,012,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	3,012,000
		PENGOLAH DATA	6	3,012,000
		VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	3,012,000
		PENGELOLA DATA	6	3,012,000
		PENGELOLA TEKNIS SURVEY JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN	6	3,012,000
		PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	6	3,012,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	3,012,000
		PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	6	3,012,000
		PENGOLAH DATA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	6	3,012,000
		PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	6	3,012,000
		PENGELOLA GEOSPASIAL	6	3,012,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	3,012,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	3,012,000
		PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	3,012,000
		PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	6	2,393,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	2,347,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	14	13,282,000

AHLI UTAMA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	13	8,306,000
SEKRETARIS	12	8,985,000
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	11	7,370,000
KEPALA BIDANG ASET	11	7,370,000
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PELAYANAN PAJAK	11	7,370,000
KEPALA BIDANG ANGGARAN	11	7,370,000
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	11	7,370,000
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	11	7,370,000
AHLI MADYA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	11	5,135,000
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,662,000
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN	9	4,662,000
AHLI MUDA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	9	3,702,000
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENDAPATAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BELANJA	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN ASET	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN AKUISISI ASET	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI EVALUASI ANGGARAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN	8	4,115,000
KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN	8	4,115,000
AHLI PERTAMA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	8	3,123,000

	ANALIS KEUANGAN AHLI (PERTAMA)	8	3,123,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,466,000
	ANALIS BARANG MILIK NEGARA	7	3,466,000
	ANALIS PENAGIHAN PAJAK	7	3,466,000
	ANALIS STANDAR BIAYA	7	3,466,000
	ANALIS ASET DAERAH	7	3,466,000
	ANALIS PAJAK DAERAH	7	3,466,000
	ANALIS PENYUSUNAN ANGGARAN	7	3,466,000
	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	7	3,466,000
	ANALIS REKENING DAERAH	7	3,466,000
	ANALIS PERBENDAHARAAN	7	3,466,000
	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	7	3,466,000
	ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	7	3,466,000
	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN LAPORAN	7	3,466,000
	BENDAHARA	7	3,466,000
	PENATA LAPORAN KEUANGAN	7	3,466,000
	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7	3,466,000
	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	7	3,466,000
	PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG	7	3,466,000
	PENATA KEUANGAN	7	3,466,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,466,000
	ANALIS KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	7	3,466,000
	PENGOLAH DATA	6	3,012,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3,012,000
	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	3,012,000
	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN	6	3,012,000
	PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6	3,012,000
	PENGELOLA KEUANGAN	6	3,012,000
	PENGELOLA DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN	6	3,012,000
	PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD	6	3,012,000
	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	6	3,012,000
	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	6	3,012,000

	PENGELOLA AKUISISI	6	3,012,000
	PENGELOLA DATA REKONSILIASI	6	3,012,000
	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	6	3,012,000
	PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	6	3,012,000
	PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK	6	3,012,000
	PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	6	3,012,000
	PENGELOLA WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	6	3,012,000
	PENGELOLA PELAPORAN DATA PENERIMAAN	6	3,012,000
	VERIFIKATOR ANGGARAN	6	3,012,000
	PENGOLAH DATA PENGANGGARAN	6	3,012,000
	PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	6	3,012,000
	PENGELOLA GAJI	6	3,012,000
	PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR	6	3,012,000
	PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH	6	3,012,000
	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	3,012,000
	PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA	6	3,012,000
	PENGOLAH DATA PENDATAAN, PEMETAAN, DAN PENILAIAN	6	3,012,000
	PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN	6	3,012,000
	PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK	6	3,012,000
	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	6	3,012,000
	PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	6	3,012,000
	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	3,012,000
	PENGELOLA DATA	6	3,012,000
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	3,012,000
	PENGELOLA DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN	6	3,012,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI PAJAK	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
	PENGEMUDI	3	1,609,000
	PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000

		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN	13	8,306,000
		SEKRETARIS	12	8,985,000
		KEPALA BIDANG FORMASI DAN INFORMASI	11	7,370,000
		KEPALA BIDANG MUTASI	11	7,370,000
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	11	7,370,000
		AHLI MADYA - ANALIS KEPEGAWAIAN	11	5,135,000
		AHLI MADYA - ASSESSOR SDM APARATUR	11	5,135,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN DATA	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN PENGHARGAAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN PEMINDAHAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN DAN Pensiun	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG JABATAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER	9	4,662,000
		KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN	9	4,662,000
		AHLI MUDA - ANALIS KEPEGAWAIAN	9	3,702,000
		AHLI MUDA - ASSESSOR SDM APARATUR	9	3,702,000
		AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN	8	3,123,000
		AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR	8	3,123,000
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,466,000
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,466,000
		BENDAHARA	7	3,466,000
		ANALIS SUMBER DAYA APARATUR	7	3,466,000
		ANALIS SISTEM INFORMASI	7	3,466,000
		ANALIS KINERJA	7	3,466,000
		ANALIS JABATAN	7	3,466,000
		ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	7	3,466,000
		ANALIS DIKLAT	7	3,466,000
		ANALIS PENGEMBANGAN KARIR	7	3,466,000
		ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	7	3,466,000

		ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	7	3,466,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	3,012,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3,012,000
		PENGOLAH DATA	6	3,012,000
		PENGELOLA DATA	6	3,012,000
		PENGELOLA SITUS/WEB	6	3,012,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	3,012,000
		PRANATA DIKLAT	6	3,012,000
		PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	6	3,012,000
		PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	6	3,012,000
		PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	6	3,012,000
		PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	6	3,012,000
		PENGELOLA PENGEMBANGAN KARIR	6	3,012,000
		PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI	6	3,012,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	3,012,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	3,012,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	14	13,282,000
		SEKRETARIS	12	8,985,000
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	7,249,000
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR	11	7,249,000
		KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	11	7,249,000
		KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	11	7,249,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,571,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	4,041,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK	8	4,041,000

7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENINDAKAN	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI KERJASAMA	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	8	4,041,000
		PENYELIA - POLISI PAMONG PRAJA	8	3,123,000
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,401,000
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,401,000
		BENDAHARA	7	3,401,000
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - POLISI PAMONG PRAJA	7	2,753,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,955,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,955,000
		PENGELOLA DATA	6	2,955,000
		PENGOLAH DATA	6	2,955,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,955,000
		PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	2,955,000
		PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	6	2,955,000
		PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI	6	2,955,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,955,000
		PELAKSANA/TERAMPIL - POLISI PAMONG PRAJA	6	2,393,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PENGADUAN PUBLIK	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	2,347,000
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA - POLISI PAMONG PRAJA	5	1,995,000
		PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	13,282,000

AHLI UTAMA - PRANATA KOMPUTER	13	8,306,000
SEKRETARIS	11	7,430,000
KEPALA BIDANG STANDARISASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	11	7,370,000
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	11	7,370,000
KEPALA BIDANG PERIZINAN	11	7,370,000
AHLI MADYA - PRANATA KOMPUTER	11	5,135,000
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,662,000
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	9	4,662,000
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	9	4,662,000
AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	9	3,702,000
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PUBLIKASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8	4,115,000
KEPALA SEKSI STANDARISASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENANAMAN MODAL	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN USAHA	8	4,115,000
KEPALA SEKSI VERIFIKASI ADMINISTRASI PERIZINAN	8	4,115,000
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	8	3,123,000
BENDAHARA	7	3,466,000
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,466,000
PENYUSUN BAHAN PENERAPAN STANDAR WAJIB DAN PENANGANAN PENGADUAN	7	3,466,000
PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	7	3,466,000
PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	7	3,466,000
PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	7	3,466,000
ANALIS PENANAMAN MODAL	7	3,466,000
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	3,466,000
ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	7	3,466,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,466,000
PENGOLAH DATA	6	3,012,000
PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN	6	3,012,000

		PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6	3,012,000
		PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	6	3,012,000
		PENGELOLA KERJASAMA PENANAMAN MODAL	6	3,012,000
		PENGELOLA PEMETAAN SUMBERDAYA INVESTASI	6	3,012,000
		PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	6	3,012,000
		PENGELOLA DATA	6	3,012,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	3,012,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3,012,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	3,012,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	3,012,000
		PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN INVESTASI	6	3,012,000
		PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR	6	3,012,000
		PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	6	3,012,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI AKSES PERMODALAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
8	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14	13,282,000
		KEPALA BAGIAN UMUM	11	7,430,000
		KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	11	7,430,000
		KEPALA BAGIAN KEUANGAN	11	7,430,000
		KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS	11	7,430,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PELAPORAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	3,857,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	8	3,857,000
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI RAPAT DAN PROTOKOL	8	3,857,000
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN ANGGARAN	8	3,857,000
		KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN	8	3,857,000

		KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	8	3,857,000
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS	8	3,857,000
		KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI, INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT	8	3,857,000
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM	8	3,857,000
		ANALIS PRODUK HUKUM	7	3,174,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		ANALIS HUKUM	7	3,174,000
		PENYUSUN BAHAN INFORMASI	7	3,174,000
		PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7	3,174,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	6	2,758,000
		PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	6	2,758,000
		PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	6	2,758,000
		PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI RAPAT	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
9	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	14	13,282,000

AHLI UTAMA - PAMONG BELAJAR	13	8,306,000
AHLI UTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN	13	8,306,000
AHLI UTAMA - PRANATA KOMPUTER	13	8,306,000
SEKRETARIS	12	8,985,000
PENILIK AHLI (MADYA)	11	5,135,000
AHLI MADYA - PAMONG BELAJAR	11	5,135,000
AHLI MADYA - ANALIS KEPEGAWAIAN	11	5,135,000
AHLI MADYA - PRANATA KOMPUTER	11	5,135,000
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11	7,068,000
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	11	7,068,000
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	11	7,068,000
KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA	11	7,068,000
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	11	7,068,000
PENILIK AHLI (MUDA)	9	3,702,000
AHLI MUDA - PAMONG BELAJAR	9	3,702,000
AHLI MUDA - ANALIS KEPEGAWAIAN	9	3,702,000
AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	9	3,702,000
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM	9	4,342,000
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,342,000
PENILIK AHLI (PERTAMA)	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN	8	3,123,000
PENYELIA - PRANATA KOMPUTER	8	3,123,000
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,968,000
KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIK	8	3,968,000
KEPALA SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN	8	3,968,000
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8	3,968,000
KEPALA SEKSI MANAJEMEN SEKOLAH DASAR	8	3,968,000
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR	8	3,968,000
KEPALA SEKSI KURIKULUM SEKOLAH DASAR	8	3,968,000

KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	3,968,000
KEPALA SEKSI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	3,968,000
KEPALA SEKSI MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	3,968,000
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAH RAGA	8	3,968,000
KEPALA SEKSI PEMUDA DAN PRAMUKA	8	3,968,000
KEPALA SEKSI OLAH RAGA	8	3,968,000
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KELUARGA	8	3,968,000
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT, KURSUS DAN KESETARAAN	8	3,968,000
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	8	3,968,000
KEPALA TATA USAHA	7	3,239,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,239,000
BENDAHARA	7	3,239,000
ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7	3,239,000
ANALIS PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7	3,239,000
ANALIS PENDIDIKAN	7	3,239,000
ANALIS TENAGA KEPENDIDIKAN	7	3,239,000
ANALIS TATA USAHA	7	3,239,000
ANALIS KEOLAH RAGAAN	7	3,239,000
ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	7	3,239,000
ANALIS KURSUS DAN KESETARAAN	7	3,239,000
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,239,000
PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - PRANATA KOMPUTER	7	2,753,000
PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	6	2,393,000
PENGOLAH DATA	6	2,815,000
VERIFIKATOR KEUANGAN	6	2,815,000
PENGELOLA GAJI	6	2,815,000
PENGOLAH DAFTAR GAJI	6	2,815,000
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,815,000
PRANATA BARANG DAN JASA	6	2,815,000
PENGELOLA KENDARAAN	6	2,815,000
PENGELOLA DATA	6	2,815,000

		PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6	2,815,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6	2,815,000
		PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	6	2,815,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA TENAGA KEPENDIDIKAN	6	2,815,000
		PENGELOLA KARIER PENDIDIK	6	2,815,000
		PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	6	2,815,000
		PENGELOLA KURIKULUM	6	2,815,000
		PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH	6	2,815,000
		PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	6	2,815,000
		PENGELOLA SARANA OLAH RAGA	6	2,815,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,815,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,815,000
		PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN EVALUASI	6	2,815,000
		PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIS	6	2,815,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,815,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KESISWAAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	2,347,000
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA -PRANATA KOMPUTER	5	1,995,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
10	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	13	8,306,000

AHLI UTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	13	8,306,000
AHLI UTAMA - SANITARIAN	13	8,306,000
AHLI UTAMA - EPIDEMIOLOG	13	8,306,000
AHLI UTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	13	8,306,000
AHLI UTAMA - APOTEKER	13	8,306,000
AHLI UTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN	13	8,306,000
SEKRETARIS	11	7,430,000
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	11	7,370,000
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	11	7,370,000
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	11	7,370,000
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	11	7,370,000
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11	7,370,000
AHLI MADYA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	11	5,135,000
AHLI MADYA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	11	5,135,000
AHLI MADYA - SANITARIAN	11	5,135,000
AHLI MADYA - EPIDEMIOLOG	11	5,135,000
AHLI MADYA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	11	5,135,000
AHLI MADYA - APOTEKER	11	5,135,000
AHLI MADYA - ANALIS KEPEGAWAIAN	11	5,135,000
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI	9	4,662,000
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET	9	4,662,000
KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	9	4,662,000
KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	4,662,000
KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAH RAGA	9	4,662,000
KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	9	4,662,000
KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9	4,662,000
KEPALA SEKSI KEFARMASIAN	9	4,662,000
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	9	4,662,000
KEPALA SEKSI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	9	4,662,000
KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	9	4,662,000
KEPALA UPT INSTALASI FARMASI	9	4,662,000

AHLI MUDA - APOTEKER	9	3,702,000
AHLI MUDA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	9	3,702,000
AHLI MUDA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	9	3,702,000
AHLI MUDA - SANITARIAN	9	3,702,000
AHLI MUDA - EPIDEMIOLOG	9	3,702,000
AHLI MUDA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	9	3,702,000
AHLI MUDA - ANALIS KEPEGAWAIAN	9	3,702,000
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	8	4,115,000
KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	8	4,115,000
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	8	4,115,000
KEPALA SEKSI KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	8	4,115,000
AHLI PERTAMA - APOTEKER	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - SANITARIAN	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN	8	3,123,000
PENYELIA - ASISTEN APOTEKER	8	3,123,000
PENYELIA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	8	3,123,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,466,000
BENDAHARA	7	3,466,000
ANALIS KEUANGAN	7	3,466,000
ANALIS TATA USAHA	7	3,466,000
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	3,466,000
ANALIS KEPEGAWAIAN	7	3,466,000
ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	7	3,466,000
ANALIS GIZI	7	3,466,000

	ANALIS KESEHATAN	7	3,466,000
	ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK	7	3,466,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,466,000
	PEMERIKSA SANITASI	7	3,466,000
	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	7	3,466,000
	INSPEKTUR SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	7	3,466,000
	PENYULUH OBAT DAN MAKANAN	7	3,466,000
	ANALIS OBAT DAN MAKANAN	7	3,466,000
	PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - ASISTEN APOTEKER	7	2,753,000
	PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	7	2,753,000
	PENGOLAH DATA	6	3,012,000
	PENGELOLA GAJI	6	3,012,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3,012,000
	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	3,012,000
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	3,012,000
	PENGELOLA PROGRAM GIZI	6	3,012,000
	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	3,012,000
	PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT DAN IMUNISASI	6	3,012,000
	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	6	3,012,000
	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	6	3,012,000
	PENGELOLA DATA	6	3,012,000
	PENGELOLA LABORATORIUM	6	3,012,000
	PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN	6	3,012,000
	PENGELOLA KEFARMASIAN	6	3,012,000
	PENGELOLA KEUANGAN	6	3,012,000
	PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	6	3,012,000
	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	6	3,012,000
	PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	6	3,012,000
	PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN	6	3,012,000
	PENGELOLA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	6	3,012,000
	PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	6	3,012,000

		PENGELOLA BAHAN DAN PERENCANAAN	6	3,012,000
		PENGELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI	6	3,012,000
		PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA	6	3,012,000
		PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	6	3,012,000
		PENGELOLA PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6	3,012,000
		PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN PSC 119	6	3,012,000
		PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	6	3,012,000
		PENGELOLA DATA PENGENDALIAN MASYARAKAT	6	3,012,000
		PENGELOLA BINA KESEJAHTERAAN KELUARGA	6	3,012,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	3,012,000
		PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	6	2,393,000
		PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	6	2,393,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PELATIHAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI	5	2,347,000
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1,995,000
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA - ASISTEN APOTEKER	5	1,995,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU LABORATORIUM	1	1,504,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	13	8,306,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11	7,249,000
		KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	11	7,249,000
		KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11	7,249,000
		KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	11	7,249,000
		AHLI MADYA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	11	5,135,000

	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,571,000
	KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN MUNJUNGAN	9	4,571,000
	KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PANGGUL	9	4,571,000
	KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN WATULIMO	9	4,571,000
	AHLI MUDA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	9	3,702,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	4,041,000
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	8	4,041,000
	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8	4,041,000
	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	8	4,041,000
	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	8	4,041,000
	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	8	4,041,000
	KEPALA SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN	8	4,041,000
	KEPALA SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN	8	4,041,000
	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	8	4,041,000
	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	8	4,041,000
	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	8	3,123,000
	PENYELIA - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8	3,123,000
	BENDAHARA	7	3,401,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,401,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,401,000
	ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	3,401,000
	ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	3,401,000
	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	7	3,401,000
	PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN	7	2,753,000
	PENGOLAH DATA	6	2,955,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,955,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,955,000
	PENGELOLA DATABASE	6	2,955,000
	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	6	2,955,000
	PENGELOLA KEUANGAN	6	2,955,000

		PENGELOLA DATA	6	2,955,000
		PENGOLAH DATA PELAYANAN	6	2,955,000
		PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6	2,955,000
		PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN	6	2,955,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,955,000
		PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	2,955,000
		PENGELOLA MUTASI PENDUDUK	6	2,955,000
		PENGELOLA DATA PELAYANAN	6	2,955,000
		PELAKSANA/TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	6	2,393,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	2,347,000
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	1,995,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
12	DINAS PERIKANAN	KEPALA DINAS PERIKANAN	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - PENYULUH PERIKANAN	13	8,306,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP	11	7,068,000
		AHLI MADYA - PENYULUH PERIKANAN	11	5,135,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,342,000
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PEMASARAN	9	4,342,000
		KEPALA SEKSI BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	9	4,342,000
		KEPALA SEKSI PERBENIHAN, KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	9	4,342,000
		KEPALA SEKSI EKSPLOITASI DAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN	9	4,342,000
		KEPALA UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	9	4,342,000
		AHLI MUDA - PENYULUH PERIKANAN	9	3,702,000
		AHLI PERTAMA - PENYULUH PERIKANAN	8	3,123,000

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,968,000
KEPALA SEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	8	3,968,000
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN	8	3,968,000
BENDAHARA	7	3,239,000
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,239,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,239,000
ANALIS PASAR	7	3,239,000
ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	7	3,239,000
PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA	7	3,239,000
ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	7	3,239,000
ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA	7	3,239,000
ANALIS STANDARDISASI BUDIDAYA	7	3,239,000
PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	7	3,239,000
ANALIS POTENSI PERBENIHAN	7	3,239,000
ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	7	3,239,000
ANALIS BENIH	7	3,239,000
ANALIS PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN	7	3,239,000
ANALIS KENELAYANAN	7	3,239,000
ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN	7	3,239,000
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	7	3,239,000
PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	3,239,000
PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN JENIS IKAN	7	3,239,000
ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR	7	3,239,000
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,815,000
PENGELOLA DATA	6	2,815,000
PENGELOLA KEUANGAN	6	2,815,000
PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA	6	2,815,000
PENGOLAH DATA	6	2,815,000
PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN	6	2,815,000
PENGELOLA PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU SECARA LABORATORIS TERHADAP PRODUK HASIL PERIKANAN	6	2,815,000
PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	6	2,815,000
PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN	6	2,815,000

		PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN	6	2,815,000
		PENGELOLA JASA PANGKALAN PENDARATAN IKAN	6	2,815,000
		PENGELOLA PENGAWASAN	6	2,815,000
		PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	6	2,815,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,815,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,815,000
		PENGELOLA PENGAWASAN PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN	6	2,815,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,815,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI ANGGARAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		TEKNISI KONSERVASI	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
13	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14	13,282,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG PEMASARAN	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	11	7,068,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,342,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,342,000
		KEPALA UPT DESTINASI WISATA TERPADU	9	4,342,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI DESTINASI WISATA ALAM	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TATA KELOLA DESTINASI	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI DESTINASI WISATA BUDAYA DAN BUATAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI SARANA PROMOSI DAN INFORMASI PARIWISATA	8	3,968,000

	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA	8	3,968,000
	KEPALA SEKSI USAHA SARANA PARIWISATA	8	3,968,000
	KEPALA SEKSI USAHA JASA PARIWISATA	8	3,968,000
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN	8	3,968,000
	KEPALA SEKSI PELESTARIAN TRADISI, SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA	8	3,968,000
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN KELEMBAGAAN SENI BUDAYA	8	3,968,000
	KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	8	3,968,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,239,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,239,000
	BENDAHARA	7	3,239,000
	KOORDINATOR	7	3,239,000
	PENYUSUN PROGRAM PENULISAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	7	3,239,000
	ANALIS BUDAYA	7	3,239,000
	PENGAWAS KEPARIWISATAAN	7	3,239,000
	ANALIS OBJEK WISATA	7	3,239,000
	ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA	7	3,239,000
	ANALIS PARIWISATA	7	3,239,000
	ANALIS KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	7	3,239,000
	PENYULUH WISATA	7	3,239,000
	PENGOLAH DATA	6	2,815,000
	PENGELOLA DATA	6	2,815,000
	PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN	6	2,815,000
	PENGELOLA OBJEK WISATA	6	2,815,000
	PENGELOLA KEUANGAN	6	2,815,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,815,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,815,000
	PENGELOLA PEMASARAN	6	2,815,000
	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	6	2,815,000
	PENGOLAH MAKANAN	6	2,815,000
	PRANATA JAMUAN	6	2,815,000
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,815,000
	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	6	2,815,000

		PENGELOLA SARANA WISATA	6	2,815,000
		PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA	6	2,815,000
		PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA WARISAN BUDAYA	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEBUDAYAAN	6	2,815,000
		PENGADMINISTRASI IZIN USAHA PARIWISATA	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KARCIS	5	2,347,000
		PEMANDU WISATA	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	5	2,347,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	1,609,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - PENATA RUANG	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	13	8,306,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN TEKNIS	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG BINA MARGA	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PERTANAHAN	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN	11	6,947,000
		AHLI MADYA - PENATA RUANG	11	5,135,000
		AHLI MADYA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	11	5,135,000

AHLI MADYA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	11	5,135,000
AHLI MADYA - TEKNIK PENGAIRAN	11	5,135,000
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, DAN PELAPORAN	9	4,251,000
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	9	4,251,000
KEPALA SEKSI KONSERVASI SDA DAN PENGEMBANGAN IRIGASI	9	4,251,000
KEPALA SEKSI PERMASALAHAN PERTANAHAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	9	4,251,000
KEPALA UPT LABORATORIUM DAN KONSTRUKSI	9	4,251,000
AHLI MUDA - PENATA RUANG	9	3,702,000
AHLI MUDA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	9	3,702,000
AHLI MUDA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	9	3,702,000
AHLI MUDA - TEKNIK PENGAIRAN	9	3,702,000
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BANGUNAN AIR	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI BINA MANFAAT DAN JASA KONSTRUKSI	8	3,857,000
KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	8	3,857,000
KEPALA SEKSI INVENTARISASI, PENGUASAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN	8	3,857,000
AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	8	3,123,000
BENDAHARA	7	3,174,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,174,000
ANALIS PERENCANAAN	7	3,174,000
ANALIS JALAN JEMBATAN	7	3,174,000

	ANALIS TEKNIK DAN MATERI	7	3,174,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,174,000
	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	7	3,174,000
	PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	7	3,174,000
	PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	7	3,174,000
	PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT	7	3,174,000
	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	3,174,000
	ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	3,174,000
	PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	7	3,174,000
	ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	3,174,000
	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	3,174,000
	ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	7	3,174,000
	ANALIS PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH	7	3,174,000
	ANALIS KONFLIK PERTANAHAN	7	3,174,000
	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	3,174,000
	PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON	7	3,174,000
	ANALIS TATA RUANG	7	3,174,000
	PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	3,174,000
	PENGUJI BAHAN LABORATORIUM	7	3,174,000
	PENGUJI BAHAN DAN KONSTRUKSI	7	3,174,000
	PENGUJI BAHAN DAN BANGUNAN	7	3,174,000
	ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	7	3,174,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
	PENGOLAH DATA	6	2,758,000
	PENGELOLA DATA	6	2,758,000
	PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
	PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	6	2,758,000
	PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN	6	2,758,000
	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	6	2,758,000
	PENILIK JALAN	6	2,758,000
	PENGELOLA PEMELIHARAAN JALAN	6	2,758,000
	PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	6	2,758,000

		PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	6	2,758,000
		PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA TATA RUANG	6	2,758,000
		PENGELOLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	6	2,758,000
		PENGELOLA TATA RUANG DAN TATA GUNA BANGUNAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA BAHAN DAN KONSTRUKSI	6	2,758,000
		PENGELOLA IRIGASI	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA PENATAGUNAAN TANAH	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA HAK ATAS TANAH	6	2,758,000
		PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG	6	2,758,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		OPERATOR ALAT BERAT	5	2,347,000
		PEMELIHARA JALAN	3	1,609,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PENJAGA PINTU AIR	2	1,559,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
15	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - SANITARIAN	13	8,306,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	11	6,947,000

AHLI MADYA - SANITARIAN	11	5,135,000
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,251,000
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,251,000
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN	9	4,251,000
KEPALA SEKSI AIR LIMBAH DOMESTIK DAN DRAINASE	9	4,251,000
KEPALA UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH	9	4,251,000
AHLI MUDA - SANITARIAN	9	3,702,000
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PERMUKIMAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PERUMAHAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN SANITASI PENYEDIAAN AIR MINUM	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGKAJIAN LINGKUNGAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	8	3,857,000
AHLI PERTAMA - SANITARIAN	8	3,123,000
TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA	8	3,123,000
ANALIS PERENCANAAN	7	3,174,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,174,000
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,174,000
BENDAHARA	7	3,174,000
ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	7	3,174,000
PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN	7	3,174,000
ANALIS PERUMAHAN	7	3,174,000
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	3,174,000
PENELAHAH DAMPAK LINGKUNGAN	7	3,174,000
PENGAWAS KESELATANAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	7	3,174,000
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	7	3,174,000
ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	7	3,174,000

	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	3,174,000
	ANALIS INFRASTRUKTUR	7	3,174,000
	PENGAWAS OPERASIONAL ALAT BERAT	7	3,174,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,758,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
	PENGOLAH DATA	6	2,758,000
	PENGELOLA DATA	6	2,758,000
	PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
	PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	6	2,758,000
	PENGELOLA LINGKUNGAN	6	2,758,000
	PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN	6	2,758,000
	PENGELOLA KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	6	2,758,000
	PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN	6	2,758,000
	PRANATA TAMAN	6	2,758,000
	PENGELOLA SAMPAH	6	2,758,000
	PENGELOLA LIMBAH	6	2,758,000
	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6	2,758,000
	PENGELOLA TEKNIS SURVEI JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN	6	2,758,000
	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	6	2,758,000
	PENGELOLA PENATAAN SAMPAH	6	2,758,000
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
	PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
	JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN	5	2,347,000
	TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	2,347,000
	TEKNISI AIR	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	2,347,000
	OPERATOR ALAT BERAT	5	2,347,000
	PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000

		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
		PRAMU TAMAN	1	1,504,000
16	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	13,282,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	11	7,370,000
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11	7,370,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	7,370,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL	11	7,370,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,662,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,662,000
		KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9	4,662,000
		KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	9	4,662,000
		KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK	9	4,662,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	4,115,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	8	4,115,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL	8	4,115,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS	8	4,115,000
		KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	8	4,115,000
		KEPALA SEKSI PENGUATAN KELUARGA	8	4,115,000
		KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN	8	4,115,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT	8	4,115,000
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL	8	4,115,000
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,466,000
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,466,000
		BENDAHARA	7	3,466,000
		ANALIS PELAYANAN SOSIAL	7	3,466,000
		ANALIS MASALAH SOSIAL	7	3,466,000
		PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	7	3,466,000

PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	7	3,466,000
ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN	7	3,466,000
ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	7	3,466,000
ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	7	3,466,000
ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	7	3,466,000
ANALIS JAMINAN SOSIAL	7	3,466,000
PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK	7	3,466,000
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3,012,000
PENGELOLA KEUANGAN	6	3,012,000
PRANATA KEARSIPAN	6	3,012,000
PENGOLAH DATA	6	3,012,000
PENGELOLA BIMBINGAN DAN KONSELING	6	3,012,000
PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	6	3,012,000
PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL	6	3,012,000
PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	6	3,012,000
PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	6	3,012,000
PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL	6	3,012,000
PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	6	3,012,000
PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	6	3,012,000
PENGELOLA BIMBINGAN SOSIAL	6	3,012,000
PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL	6	3,012,000
PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	3,012,000
PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	3,012,000
PENGELOLA DATA	6	3,012,000
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	3,012,000
PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL	6	3,012,000
PENGELOLA RENCANA SOSIAL DAN KESEHATAN	6	3,012,000
PENGELOLA DATA DAMPAK BENCANA	6	3,012,000
PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN	6	3,012,000
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000

		PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI ANAK TERLANTAR	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PENGANGKATAN DAN PENGAKUAN ANAK	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - PENGANTAR KERJA	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - INSTRUKTUR	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13	8,306,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	6,947,000
		AHLI MADYA - INSTRUKTUR	11	5,135,000
		AHLI MADYA - PENGANTAR KERJA	11	5,135,000
		AHLI MADYA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	11	5,135,000
		AHLI MADYA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11	5,135,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PELAPORAN DAN PERENCANAAN	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN DESAIN PRODUK INDUSTRI	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI INDUSTRI AGRO	9	4,251,000
		AHLI MUDA - PENGANTAR KERJA	9	3,702,000
		AHLI MUDA - INSTRUKTUR	9	3,702,000
		AHLI MUDA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9	3,702,000
		AHLI MUDA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	9	3,702,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI SYARAT KERJA	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN JAMSOSTEK	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI INDUSTRI NON AGRO	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	8	3,857,000

KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8	3,857,000
KEPALA SEKSI TRANSMIGRASI	8	3,857,000
AHLI PERTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8	3,123,000
BENDAHARA	7	3,174,000
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,174,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,174,000
ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI	7	3,174,000
ANALIS PENGEMBANGAN USAHA AGRO INDUSTRI	7	3,174,000
ANALIS INDUSTRI	7	3,174,000
ANALIS STANDARISASI INDUSTRI	7	3,174,000
ANALIS INDUSTRI	7	3,174,000
ANALIS TENAGA KERJA	7	3,174,000
ANALIS BAHAN PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN	7	3,174,000
PERANCANG KEMASAN INFORMASI STANDARDISASI	7	3,174,000
PENGOLAH DATA	6	2,758,000
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG	6	2,758,000
PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	2,758,000
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
PENGELOLA BAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	6	2,758,000
PENGELOLA DATA PAMERAN DAN KEMITRAAN	6	2,758,000
PENGELOLA BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	6	2,758,000
PENGELOLA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA	6	2,758,000
PENGELOLA BAHAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	6	2,758,000
PENGELOLA KETRANSMIGRASIAN	6	2,758,000
PRANATA KEARSIPAN	6	2,758,000
PRANATA KETRANSMIGRASIAN	6	2,758,000
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - PENYULUH PERTANIAN	13	8,306,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG BINA PRODUKSI DAN BINA USAHA PETERNAKAN	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	11	6,947,000
		AHLI MADYA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	11	5,135,000
		AHLI MADYA - PENYULUH PERTANIAN	11	5,135,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI TANAMAN PANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI BINA USAHA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI PAKAN DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI TANAMAN SEMUSIM	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI TANAMAN TAHUNAN	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI BINA USAHA PERKEBUNAN	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI PENYULUHAN	9	4,251,000
		KEPALA SEKSI PRASARANA	9	4,251,000
		AHLI MUDA - PENYULUH PERTANIAN	9	3,702,000
		AHLI MUDA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	9	3,702,000
		KEPALA UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	9	4,251,000
		KEPALA UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	9	4,251,000

KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	9	4,251,000
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN DAN PELAYANAN MEDIK VETERINER	8	3,857,000
KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	8	3,857,000
KEPALA SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGAWASAN OBAT HEWAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI TANAMAN HORTIKULTURA	8	3,857,000
KEPALA SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK	8	3,857,000
KEPALA SEKSI BINA USAHA PETERNAKAN	8	3,857,000
KEPALA SEKSI SARANA	8	3,857,000
AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	8	3,123,000
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	8	3,123,000
PENYELIA - PENYULUH PERTANIAN	8	3,123,000
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	3,857,000
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,174,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,174,000
KOORDINATOR KEBUN PERCOBAAN	7	3,174,000
ANALIS LABORATORIUM TUMBUHAN DAN SARANA	7	3,174,000
BENDAHARA	7	3,174,000
PENGAWAS HYGIENE, SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7	3,174,000
PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	7	3,174,000
PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	7	3,174,000
PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT IKAN	7	3,174,000
ANALIS PANGAN	7	3,174,000
ANALIS POTENSI BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI	7	3,174,000
ANALIS POTENSI BUDIDAYA SEREALIA	7	3,174,000
ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	7	3,174,000
ANALIS PEMBIAYAAN PERTANIAN	7	3,174,000
ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN	7	3,174,000
PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	7	3,174,000
ANALIS PAKAN TERNAK	7	3,174,000
PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR	7	3,174,000

PENYUSUN RENCANA MANAJEMEN MUTU PASCA PANEN	7	3,174,000
ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	7	3,174,000
PENYUSUN TEKNIS USAHA BUDIDAYA	7	3,174,000
ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN	7	3,174,000
ANALIS PROGRAM PENYULUHAN	7	3,174,000
PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA	7	3,174,000
ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	7	3,174,000
ANALIS TANAH PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	7	3,174,000
PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - ANALIS HARGA PASAR	7	2,753,000
PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - PENYULUH PERTANIAN	7	2,753,000
ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA	7	3,174,000
ANALIS BARANG MILIK NEGARA	7	3,174,000
ANALIS PENGENDALIAN LAHAN	7	3,174,000
ANALIS PENGELOLAAN KOMODITAS PERKEBUNAN	7	3,174,000
ANALIS PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	7	3,174,000
PENGOLAH DATA	6	2,758,000
PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
PENGELOLA INSTALASI KEBUN/LAHAN DAN SCREEN HOUSE	6	2,758,000
PENGELOLA KANDANG HEWAN PERCOBAAN	6	2,758,000
PENGELOLA KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	6	2,758,000
PENGELOLA LAHAN PERTANIAN	6	2,758,000
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	2,758,000
PENGELOLA PETERNAKAN	6	2,758,000
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
PRANATA KEARSIPAN	6	2,758,000
PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS	6	2,758,000
PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	6	2,758,000
PENGELOLA LABORATORIUM	6	2,758,000
PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	6	2,758,000
PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	6	2,758,000
PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	6	2,758,000
PENGELOLA POLA PANGAN HARAPAN	6	2,758,000

PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	6	2,758,000
PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	6	2,758,000
PENGELOLA DAN KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	6	2,758,000
PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	6	2,758,000
PENGELOLA INSTALASI TERNAK	6	2,758,000
PENGELOLA DISTRIBUSI TERNAK GADUHAN DAN SEMI GADUHAN	6	2,758,000
PENGELOLA LALU LINTAS TERNAK/ PENGURUS IZIN BUDI DAYA TERNAK	6	2,758,000
PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN	6	2,758,000
PENGELOLA PASCA PANEN	6	2,758,000
PENGELOLA PEKARYA KEBUN	6	2,758,000
PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	6	2,758,000
PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	2,758,000
PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	6	2,758,000
PENGELOLA ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENYULUH PERTANIAN	6	2,758,000
PENGELOLA ALAT DAN MESIN PERTANIAN	6	2,758,000
PENGELOLA TATA GUNA LAHAN, AIR, SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	6	2,758,000
PELAKSANA/TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	6	2,393,000
PERAWAT TERNAK	6	2,758,000
PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	6	2,758,000
PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK/ UNGGAS DAN LALU LINTAS DAGING	6	2,758,000
PENGELOLA KEBUN KOPI PERKEBUNAN	6	2,758,000
PENGELOLA TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	6	2,758,000
PENGELOLA DATA PERENCANAAN	6	2,758,000
PENGELOLA TEKNOLOGI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN	6	2,758,000
PENGELOLA ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN	6	2,758,000
PENGELOLA DATA PERKEBUNAN	6	2,758,000
PENGOLAH DATA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
PENGOLAH PROGRAM PENYULUHAN	6	2,758,000
PENGOLAH DATA UPT PSTP	6	2,758,000
PRANATA KEARSIPAN	6	2,758,000
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PELATIH / PAWANG HEWAN	5	2,347,000
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA - PENYULUH PERTANIAN	5	1,995,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	13,282,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DESA	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DESA	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PERDESAAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI USAHA EKONOMI PERDESAAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN PERDESAAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PERDESAAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,174,000
		PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN	7	3,174,000
		PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	7	3,174,000
		ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	7	3,174,000
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,174,000
		ANALIS TATA USAHA	7	3,174,000
		ANALIS PENATAAN DAERAH	7	3,174,000

PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7	3,174,000
PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3,174,000
PENYUSUN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	7	3,174,000
PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	7	3,174,000
PENYUSUN KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	7	3,174,000
PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	7	3,174,000
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
PRANATA KEARSIPAN	6	2,758,000
PENGOLAH DATA	6	2,758,000
PENGELOLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	2,758,000
PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	6	2,758,000
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	6	2,758,000
PRANATA SUMBER DAYA IPTEK	6	2,758,000
PENGELOLA PEMBINAAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN	6	2,758,000
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	2,758,000
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	6	2,758,000
PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
PENGELOLA DATA	6	2,758,000
PENGELOLA MONITORING EVALUASI PENYELENGARAAN PEMDES	6	2,758,000
PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	6	2,758,000
PENGELOLA TUNJANGAN PENDAPATAN APARAT DESA	6	2,758,000
PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	6	2,758,000
PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER	6	2,758,000
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
PENGEMUDI	3	1,609,000
PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
PRAMU BAKTI	1	1,504,000

20	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	14	13,282,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG LALU LINTAS	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG ANGKUTAN	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASI	11	7,068,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,342,000
		KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI LLAJ	9	4,342,000
		KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN LAUT	9	4,342,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWALAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN TERMINAL	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI KETERTIBAN DAN KESELAMATAN JALAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PERPARKIRAN	8	3,968,000
		KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	8	3,968,000
		PENYELIA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	8	3,123,000
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,239,000
		BENDAHARA	7	3,239,000
		ANALIS TEKNIK SURVEY MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	7	3,239,000
		ANALIS LALU LINTAS	7	3,239,000
		ANALIS ANGKUTAN DARAT	7	3,239,000
		PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	7	3,239,000
		ANALIS PERIZINAN	7	3,239,000
		ANALIS ANGKUTAN LAUT	7	3,239,000
		PENGAWAS KESELAMATAN DARAT/ JALAN	7	3,239,000
		PENYUSUN RENCANA PENGUJIAN	7	3,239,000
		PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	7	3,239,000
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	7	2,753,000
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,239,000
		ANALIS TEHNIK SURVEY MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	7	3,239,000
		ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	7	3,239,000
		ANALIS KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	7	3,239,000

	ANALIS PENANGANAN OBJEK VITAL TRANSPORTASI	7	3,239,000
	PENYUSUN REKAYASA LALU LINTAS	7	3,239,000
	PEMERIKSA KESELAMATAN PELAYARAN	7	3,239,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,815,000
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,815,000
	PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS	6	2,815,000
	PENGELOLA SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN	6	2,815,000
	PENGELOLA PENERANGAN JALAN	6	2,815,000
	PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN	6	2,815,000
	PENGELOLA SARANA ANGKUTAN	6	2,815,000
	PENGELOLA USAHA ANGKUTAN	6	2,815,000
	PRANATA TILANG	6	2,815,000
	PENGELOLA PERPARKIRAN	6	2,815,000
	PENGELOLA DATA	6	2,815,000
	PENGELOLA KEUANGAN	6	2,815,000
	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	2,815,000
	PENGELOLA DATA TRANSPORTASI JALAN	6	2,815,000
	PENGELOLA INSTALASI/JARINGAN	6	2,815,000
	PENGELOLA PERIJINAN	6	2,815,000
	PENGELOLA PENGAWASAN LLAJ	6	2,815,000
	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	6	2,815,000
	PENYUSUN PROGRAM KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN	6	2,815,000
	PELAKSANA/TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	6	2,393,000
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI LLAJ	5	2,347,000
	TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI KARCIS	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ	5	2,347,000
	PENGADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	5	2,347,000

		PENGADMINISTRASI CONTOH UJI	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI BARANG DAERAH	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PENDAFTARAN UPT PKB	5	2,347,000
		TEKNISI SURVEI LALU LINTAS JALAN	5	2,347,000
		TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	5	2,347,000
		TEKNISI PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	5	2,347,000
		TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM	5	2,347,000
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5	1,995,000
		PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	3	1,609,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	1,609,000
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - PRANATA KOMPUTER	13	8,306,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT DAN STATISTIK	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	11	7,068,000
		AHLI MADYA - PRANATA KOMPUTER	11	5,135,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,342,000
		AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	9	3,702,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI LAYANAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	3,968,000

KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	8	3,968,000
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	8	3,123,000
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,239,000
BENDAHARA	7	3,239,000
PERANCANG GRAFIS	7	3,239,000
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	3,239,000
ANALIS INFORMASI	7	3,239,000
PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM	7	3,239,000
PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7	3,239,000
ANALIS PERSANDIAN	7	3,239,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,239,000
ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	7	3,239,000
ANALIS SISTEM INFORMASI	7	3,239,000
PENGOLAH DATA	6	2,815,000
PENGELOLA DATA	6	2,815,000
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,815,000
PENGELOLA KEUANGAN	6	2,815,000
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	2,815,000
PENGELOLA DATABASE	6	2,815,000
PENGELOLA SITUS/ WEB	6	2,815,000
TENAGA PELIPUTAN	6	2,815,000
PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA	6	2,815,000
PENGELOLA TV DAN RADIO	6	2,815,000
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	6	2,815,000
PENGELOLA SISTEM INFORMASI	6	2,815,000
PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI	6	2,815,000
PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	2,815,000
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,815,000
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,815,000
PENGELOLA DATA PERSANDIAN	6	2,815,000
PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6	2,815,000
PRANATA KEARSIPAN	6	2,815,000

		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB	5	2,347,000
		OPERATOR RADIO	5	2,347,000
		OPERATOR TRANSMISI SANDI	5	2,347,000
		OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	5	2,347,000
		TEKNISI JARINGAN INSTALASI	5	2,347,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		OPERATOR KOMPUTER GRAFIS	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
22	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - PENERA	13	8,306,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG USAHA MIKRO	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG KOPERASI	11	6,947,000
		KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	11	6,947,000
		AHLI MADYA - PENERA	11	5,135,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,251,000
		KEPALA UPT PASAR DAERAH	9	4,251,000
		AHLI MUDA - PENERA	9	3,702,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK DAN PEMASARAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KEWIRAUSAHAAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI FASILITASI DAN PERMODALAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI FASILITASI DAN PEMBIAYAAN KOPERASI	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PROMOSI	8	3,857,000

KEPALA SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN	8	3,857,000
AHLI PERTAMA - PENERA	8	3,123,000
BENDAHARA	7	3,174,000
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,174,000
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,174,000
ANALIS KOPERASI	7	3,174,000
ANALIS UMKM	7	3,174,000
ANALIS PERMODALAN	7	3,174,000
PENGAWAS KOPERASI	7	3,174,000
PENGAWAS KEMETROLOGIAN	7	3,174,000
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
PENGOLAH DATA	6	2,758,000
PRANATA KEARSIPAN	6	2,758,000
PENGELOLA DATA	6	2,758,000
PENGELOLA PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH	6	2,758,000
PENGELOLA METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KOSUMEN	6	2,758,000
PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN	6	2,758,000
PENGELOLA MUTU	6	2,758,000
PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIK TATA BANGUNAN	6	2,758,000
PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH	6	2,758,000
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI	6	2,758,000
PENGELOLA PEMASARAN	6	2,758,000
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
PENAGIH RETRIBUSI	5	2,347,000
PENGEMUDI	3	1,609,000
PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000

		JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	13,282,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURATAN	11	7,249,000
		KEPALA BIDANG LOGISTIK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	11	7,249,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,571,000
		KEPALA SEKSI KEDARURATAN	9	4,571,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI LOGISTIK	8	4,041,000
		KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	8	4,041,000
		BENDAHARA	7	3,401,000
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,401,000
		PENYULUH BENCANA	7	3,401,000
		ANALIS MITIGASI BENCANA	7	3,401,000
		ANALIS BENCANA	7	3,401,000
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,401,000
		KOORDINATOR PERGUDANGAN	7	3,401,000
		PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	7	3,401,000
		PENYULUH BENCANA	7	3,401,000
		ANALISIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN	7	3,401,000
		PENYUSUN RENCANA REHABILITASI	7	3,401,000
		PENGOLAH DATA	6	2,955,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,955,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,955,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,955,000
		PRANATA BENCANA	6	2,955,000
		PENGOLAH BAHAN UNTUK RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	6	2,955,000
		PENGELOLA DATA	6	2,955,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,955,000
		PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	6	2,955,000

		PENGELOLA KEBUTUHAN LOGISTIK	6	2,955,000
		PENGELOLA DATA DAMPAK BENCANA	6	2,955,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	14	13,282,000
		AHLI UTAMA - ARSIPARIS	13	8,306,000
		AHLI UTAMA - PUSTAKAWAN	13	8,306,000
		SEKRETARIS	11	7,430,000
		KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	11	7,068,000
		KEPALA BIDANG KEARSIPAN	11	7,068,000
		AHLI MADYA - ARSIPARIS	11	5,135,000
		AHLI MADYA - PUSTAKAWAN	11	5,135,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,342,000
		AHLI MUDA - ARSIPARIS	9	3,702,000
		AHLI MUDA - PUSTAKAWAN	9	3,702,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI DEPOSIT, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PEMASYARAKATAN ARSIP	8	3,968,000
		AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	8	3,123,000
		AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	8	3,123,000
		PENYELIA - ARSIPARIS	8	3,123,000
		PENYELIA - PUSTAKAWAN	8	3,123,000

		BENDAHARA	7	3,239,000
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	3,239,000
		PENGAWAS PERPUSTAKAAN	7	3,239,000
		PENYULUH KEARSIPAN	7	3,239,000
		PENYULUH PERPUSTAKAAN	7	3,239,000
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - ARSIPARIS	7	2,753,000
		PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR - PUSTAKAWAN	7	2,753,000
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,239,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,815,000
		PENGOLAH DATA	6	2,815,000
		PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	6	2,815,000
		PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6	2,815,000
		PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	6	2,815,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,815,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,815,000
		PRANATA REPRODUKSI ARSIP	6	2,815,000
		PRANATA RESTORASI ARSIP	6	2,815,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,815,000
		PELAKSANA/TERAMPIL - PUSTAKAWAN	6	2,393,000
		PELAKSANA/TERAMPIL - ARSIPARIS	6	2,393,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	2,347,000
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA - ARSIPARIS	5	1,995,000
		PELAKSANA PEMULA/PEMULA - PUSTAKAWAN	5	1,995,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	11,921,000
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	4,342,000
		KEPALA SEKSI KESATUAN BANGSA	8	3,968,000

		KEPALA SEKSI BINA IDEOLOGI DAN POLITIK DALAM NEGERI	8	3,968,000
		BENDAHARA	7	3,239,000
		ANALIS PENDAYAGUNAAN LEMBAGA KEAGAMAAN	7	3,239,000
		ANALIS PERMASALAHAN	7	3,239,000
		ANALIS OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	7	3,239,000
		ANALIS FORUM KERUKUNAN UMAT	7	3,239,000
		ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	7	3,239,000
		ANALIS KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	7	3,239,000
		ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	7	3,239,000
		ANALIS DATA INTELIJEN	7	3,239,000
		ANALIS INTELIJEN	7	3,239,000
		ANALIS PARTAI POLITIK	7	3,239,000
		ANALIS PEMILIHAN UMUM	7	3,239,000
		ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	7	3,239,000
		ANALIS MONITORING.EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3,239,000
		ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	7	3,239,000
		VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	2,815,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,815,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,815,000
		PENGOLAH DATA	6	2,815,000
		PENGOLAH DATA BERKAS SENGKETA	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	6	2,815,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,815,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,815,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
26	KECAMATAN TRENGGALEK	CAMAT TRENGGALEK	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000

		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
27	KECAMATAN POGALAN	CAMAT POGALAN	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000

		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
28	KECAMATAN DURENAN	CAMAT DURENAN	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	2,347,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000

		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
29	KECAMATAN WATULIMO	CAMAT WATULIMO	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	7,068,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,342,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	3,968,000
		BENDAHARA	7	3,239,000
		PENGOLAH DATA	6	2,815,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,815,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,815,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA	6	2,815,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,815,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,815,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,815,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,815,000
		PENGOLAH DATA PELAYANAN	6	2,815,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000

		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
30	KECAMATAN MUNJUNGAN	CAMAT MUNJUNGAN	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
31	KECAMATAN KAMPAK	CAMAT KAMPAK	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000

		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
32	KECAMATAN GANDUSARI	CAMAT GANDUSARI	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000

		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
33	KECAMATAN KARANGAN	CAMAT KARANGAN	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000

		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
34	KECAMATAN SURUH	CAMAT SURUH	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
35	KECAMATAN DONGKO	CAMAT DONGKO	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000

		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
36	KECAMATAN PULE	CAMAT PULE	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000

		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
37	KECAMATAN PANGGUL	CAMAT PANGGUL	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	7,068,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,342,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,968,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	3,968,000
		BENDAHARA	7	3,239,000
		PENGOLAH DATA	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA	6	2,815,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,815,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,815,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,815,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,815,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,815,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,815,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,815,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,815,000
		PENGELOLA PELAYANAN	6	2,815,000

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
38	KECAMATAN TUGU	CAMAT TUGU	12	9,532,000
		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,504,000
39	KECAMATAN BENDUNGAN	CAMAT BENDUNGAN	12	9,532,000

		SEKRETARIS	11	6,947,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	4,251,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,857,000
		BENDAHARA	7	3,174,000
		PENGOLAH DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2,758,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGEMUDI	3	1,609,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
40	KELURAHAN TAMANAN	LURAH TAMANAN	9	4,662,000
		SEKRETARIS	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	3,857,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	2,347,000

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
41	KELURAHAN SURODAKAN	LURAH SURODAKAN	9	4,662,000
		SEKRETARIS	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	3,857,000
		PENGELOLA DATA	6	2,758,000
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,758,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,609,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000
42	KELURAHAN NGANTRU	LURAH NGANTRU	9	4,662,000
		SEKRETARIS	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	3,857,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
43	KELURAHAN SUMBERGEDONG	LURAH SUMBERGEDONG	9	4,662,000
		SEKRETARIS	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	3,857,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000

44	KELURAHAN KELUTAN	LURAH KELUTAN	9	4,662,000
		SEKRETARIS	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	3,857,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	3,857,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,758,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,347,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,347,000
		PRAMU BAKTI	1	1,504,000

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI AGUSTIANI

Nip. 19671223199203 2 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BESARAN PROSENTASE PENGURANGAN SKOR KEHADIRAN

A. Tabel Prosentase TL (Terlambat) dan PSW (Pulang Sebelum Waktunya)

NO	KATEGORI	AKUMULASI TL DAN PSW PER HARI	PEMOTONG AN PER HARI
1.	TL 1 dan/atau PSW 1	1 menit sampai dengan 15 menit	0,25 %
2.	TL 2 dan/atau PSW 2	16 menit sampai dengan 30 menit	0,50 %
3.	TL 3 dan/atau PSW 3	31 menit sampai dengan 60 menit	1,00 %
4.	TL 4 dan/atau PSW 4	61 menit sampai dengan 90 menit	1,50 %
5.	TL 5 dan/atau PSW 5	lebih dari 90 menit atau hanya melakukan finger 1 (satu) kali	2,00 %

B. Tabel Prosentase Cuti dan Tidak Masuk

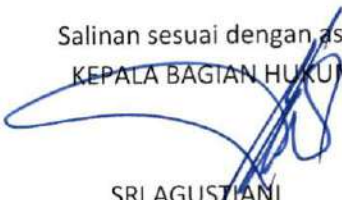
NO	KATEGORI	KETERANGAN/ INTERVAL	PEMOTONGAN PER HARI
1.	Cuti Tahunan	Menjalani cuti tahunan	2,50 %
2.	Cuti Alasan Penting	Menjalani cuti karena alasan penting	1,00 %
3.	Cuti Sakit	Menjalani Cuti Sakit	1,00 %
4.	Cuti Sakit Covid- 19	Menjalani Cuti Sakit Covid- 19	0,00 %
5.	Tidak Masuk	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	4 %

BUPATI TRENGGALEK,

TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT PENILAIAN KINERJA

A. FORMAT SASARAN/TARGET KINERJA TAHUNAN

SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama		1	Nama				
2	NIP		2	NIP				
3	Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang				
4	Jabatan		4	Jabatan				
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET				
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA

Pejabat Penilai,

NIP.

Trenggalek,
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

NIP.

B. FORMAT SASARAN/TARGET KINERJA BULANAN

**SASARAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
BULAN TAHUN**

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama		1	Nama				
2	NIP		2	NIP				
3	Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang				
4	Jabatan		4	Jabatan				
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET				
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA

Pejabat Penilai,

NIP.

Trenggalek,
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

NIP.

C. FORMAT CAPAIAN KINERJA /REALISASI BULANAN

REALISASI SKP BULAN TAHUN

NAMA

NO	KEGIATAN BULANAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nilai SKP													
DISPOSISI TUGAS													
Total Nilai SKP													(.....)

Trenggalek,
Pejabat Penilai,

.....

D. FORMAT MATRIK PEMBAGIAN SASARAN/TARGET KINERJA TAHUNAN KE DALAM SASARAN/TARGET KINERJA BULANAN

MATRIK PEMBAGIAN SASARAN/TARGET KINERJA TAHUNAN KEDALAM SASARAN/TARGET KINERJA BULANAN

NAMA / NIP.

NO.	KEGIATAN PADA SKP TAHUNAN	REALISASI KEGIATAN PADA BULAN KE -											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT PERHITUNGAN KEHADIRAN

DAFTAR PERHITUNGAN KEHADIRAN PNS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PD :

Bulan :

NO	NAMA PEGAWAI (NIP)	TANGGAL																														KETIDAKHADIRAN								SKOR KEHADIRAN				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	HP	KT I	KT II	KT III	KT IV	KTV	KM VI	KM VII					
1																																												

Keterangan:

1.  : HP (Datang dan pulang tepat waktu/sesuai jam kerja);
2.  : KT I (Terlambat dan/atau pulang mendahului 1 menit sampai dengan 15 menit);
3.  : KT II (Terlambat dan/atau pulang mendahului 16 menit sampai dengan 30 menit);
4.  : KT III (Terlambat dan/atau pulang mendahului 31 – 60 mnt);
5.  : KT IV (Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 61 menit – 90 menit);
6.  : KT V (Terlambat dan/atau pulang lebih awal lebih dari 91 menit);
7.  : KT VI (Absen satu kali)
8.  : KT VII (Tidak Masuk Kerja, Tidak Melaksanakan Kerja, Cuti, Tidak absen masuk/pulang);

Menyetujui dan mengesahkan,
Pegguna Anggaran/ Kuasa Pegguna
Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Gaji

Pembuat Daftar Gaji

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BKD	Dra. EKO JUNIATI, M.M.	
KEPALA BAKEUDA	AGUS YAHYA, S.E., M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H;	

1. Kriteria keterlambatan PNS:

a. Terlambat dan / atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit:

$$KT1 = 0,25 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

b. Terlambat dan / atau pulang mendahului 16 (enam belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:

$$KT2 = 0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

c. Terlambat dan / atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit :

$$KT3 = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

d. Terlambat dan / atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit :

$$KT4 = 1,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$

e. Terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit / Absen hanya satu kali:

$$KT5 = 2 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$

f. Tidak hadir bekerja dan / atau tidak mengisi daftar hadir kerja;

$$KT6 = 3 \% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja}.$$

(2) Skor Total Kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Skor Total Kehadiran (\%)} = 100\% - \Sigma \text{ketidakhadiran (KT)\%}$$

B. FORMAT DAFTAR SKOR CAPAIAN KINERJA

DAFTAR SKOR CAPAIAN KINERJA

NAMA PD :

BULAN :

TAHUN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	CAPAIAN KINERJA	SKOR CAPAIAN KINERJA

Trenggalek ,

Kepala OPD

NIP .

C. FORMAT PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

NAMA PD :

BULAN :

TAHUN :

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN RUANG	NO. REKENING	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP 100%	PRODUKTIFITAS KERJA	DISIPLIN KERJA	JUMLAH TPP KOTOR	PPH 21	TPP DITERIMAKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=(30%*SCK)	9=(70%*SK)	10=(7*(8+9)/100)	11	12=(10-11)	13

Trenggalek,

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA GAJI

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004